



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1981
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN PEGASING DAN KECAMATAN BINTANG DI
WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH TENGAH
DAERAH ISTIMEWA ACEH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sejak terbentuknya Perwakilan Kecamatan Bebesan di Pegasing dan Perwakilan Kecamatan Kota Takengon di Bintang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah ternyata telah menunjukkan hasil-hasil yang positif antara lain dengan bertambah lancarnya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di wilayah tersebut serta bertambahnya pusat-pusat pengembangan ekonomi lokal;

b. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan untuk kelancaran tugas-tugas penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dipandang perlu untuk membentuk 2 (dua) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN PEGASING DAN KECAMATAN BINTANG DI
WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH TENGAH
RPOPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

Pasal 1

Perwakilan Kecamatan Bebesan di Pegasing di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Aceh Tengah, ditetapkan menjadi Kecamatan Pegasing, meliputi
wilayah :

- a. Desa Uning;
- b. Desa Bies Baru;
- c. Desa Bies Penantanan;
- d. Desa Tebes Lues;
- e. Desa Atang Mejungket;
- f. Desa Lenga;
- g. Desa Kute Lintang;
- h. Desa Kong;
- i. Desa Simpang Kelaping;

j. Desa...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- j. Desa Gelelengi;
- k. Desa Terang Ulen;
- l. Desa Uring;
- m. Desa Erlop;
- n. Desa Winlah;
- o. Desa Kedelah.

Pasal 2

Perwakilan Kecamatan Kota Takengon di Bintang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah ditetapkan menjadi Kecamatan Bintang, meliputi wilayah :

- a. Desa Kuala Bintang;
- b. Desa Kuala II Bintang;
- c. Desa Linung Bulen I Bintang;
- d. Desa Linung Bulen II Bintang;
- e. Desa Serule;
- f. Desa Mengaya;
- g. Desa Mude;
- h. Desa Bamil;
- i. Desa Bale.

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pegasing berkedudukan di Simpang Kelaping.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bintang berkedudukan di Bintang.

Pasal 4

Setiap perubahan Desa-desanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, baik karena pemekaran, penggabungan, maupun penghapusan, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas-batas Wilayah Kecamatan, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat daripada pembentukan 2 (dua) Kecamatan dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Agustus 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 14 Agustus 1981

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1981 NOMOR 43